**KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH UNTUK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA**

Asep Ahmad Arsyul Munir\*

Institut Agama Islam Tasikmalaya

arsyul.munir@gmail.com

**Abstrak**

Kesadaran multikulturalisme religius diperlukan dalam masyarakat demi mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Namun, pembentukan kesadaran tersebut menghadapi tantangan berupa konflik nilai dan keyakinan antar kelompok. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi solusi atas konflik nilai dalam kerangka pembentukan kesadaran multikulturalisme religius perspektif maqashid syari’ah. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan analitik ini adalah studi bibliometrik yang mengacu pada prinsip-prinsip yang dikembangkan pada dua disiplim ilmu Maqashid Syariah dan Pendidikan Multikultural. Hasil analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi kurikulum pendidikan agama yang inklusif menjadi solusi strategis, dengan memasukkan nilai-nilai toleransi, keadilan dan kesetaraan sebagai landasan pendidikan multikultural. Simpulannya, pembentukan kesadaran multikultural-religius melalui kurikulum inklusif dapat meminimalisir konflik nilai. Untuk itu, diperlukan kerja sama pemangku kepentingan terkait dalam implementasinya. Disarankan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kurikulum inklusif dalam menumbuhkembangkan toleransi moderat perspektif maqashid syari’ah.

**Kata kunci** : *Maqashid Syari’ah, Pendidikan Multikulturalisme, Pelajar Pancasila*

**Abstract**

Religious multiculturalism awareness is needed in society in order to realize interfaith harmony. However, the formation of such awareness faces challenges in the form of conflicts of values and beliefs between groups. The purpose of this research is to identify solutions to value conflicts within the framework of forming awareness of religious multiculturalism from the maqashid shari'ah perspective. The research method used in this analytical paper is a bibliometric study that refers to the principles developed in the two disciplines of Maqashid Shariah and Multicultural Education. The results of the analysis show that the reconstruction of an inclusive religious education curriculum is a strategic solution, by incorporating the values of tolerance, justice and equality as the foundation of multicultural education. In conclusion, the formation of multicultural-religious awareness through an inclusive curriculum can minimize value conflicts. This requires the cooperation of relevant stakeholders in its implementation. Further research is recommended to evaluate the effectiveness of the inclusive curriculum implementation in fostering moderate tolerance from the maqashid shari'ah perspective.

**Key words** : *Maqashid Shari'ah, Multiculturalism Education, Pancasila Students*

**PENDAHULUAN**

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutannya. Dalam konteks kekinian, kemungkinan dapat berlanjut itu sangat kompleks. Artinya, selalu perjalanannya tak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi proses kemerdekaan yang berkemajuan itu cukup dirintangi oleh berbagai rintangan, baik dalam skup wilayah ekonomi, politik, budaya, maupun termasuk bidang pendidikan. Namun tantangan terbesar untuk semua adalah soal disintegrasi (perpecahan) yang bermula dari beberapa pemicu awalan lain semacam *disorientasi* (penyimpangan)*, disorder* (kekacauan)*, distrust* (ketidakpercayaan)*,* dan *disobedience* (pembangkangan)*.* (Hadi, 2020)Tentu bukan merupakan suatu kebetulan, bila keseluruhan tantangan ini bermain dalam satuan rumpun yang tak terpisahkan. Disintegrasi bangsa tentu tak pernah akan terjamah, kecuali terlahir fenomena empat-*dis* yang mendahuluinya. Seandainya laju geraknya tak terhentikan, maka akan menimbulkan tensi pertikaian yang meluas. Potensi konflik yang muncul setidaknya dapat dibaca dari senarai indikator internal dan eksternal dari para eksponen bangsa. Dari sudut padang internal, hal ini berkaitan dengan karakter individual bangsa yang mengalami penurunan kualitatif secara pengetahuan (*verstehen*) dan moralitas *(ethics*) terhadap pilar-pilar kenegaraan sebagai soko guru bangsa. Menariknya, kondisi ini semakin diperparah justru dengan disabilitas kesejahteraan dan keadilan yang terkonfirmasi belum terdistribusikan secara setara. Karena itu, tren perilaku (sebagian) masyarakat pada akhirnya terkontaminasi oleh sikap keberagamaan yang cenderung rigid, tertutup dan *unstable.*  Ketimpangan yang mengakibatkan ketakadilan saja (*disorder*) sudah berpotensi memberikan dalih untuk berargumentasi secara emosional, alih-alih berperilaku positif, *malah* sebaliknya. Apalagi tersirami asupan bahan bakar berupa sentimen keagamaan yang berapi-api. Tentu akibatnya bisa terprediksi. *System chaotic.* Sumbunya sudah barang tentu merupakan salahsatu dari model religiusitas berikut; fanatisme, radikalisme, vandalisme hingga berakhir terorisme.

Sementara itu, Indonesia dengan tingkat keanekaragaman yang sangat rumit dalam pelbagai aspeknya tentu tak mengherankan bila dikenali sebagai masyarakat multikultural. Secara sederhana, multikulturalisme berarti koeksistensi beragam kebudayaan yang hidup saling berdampingan dan ber-*tepo seliro* dengan dikerangkai oleh semangat penghargaan setinggi-tingginya pada keunikan (*uniqueness*) sebagai penanda kekhasannya. Kondisi ini sebenarnya tak luput dari dampak sosio-kultur-geografis Indonesia yang diketahui memiliki sekira 17.000 ribu pulau dengan kurang lebih 250 bahasa yang berlainan. Adalah hal yang merupakan anugerah satu sisi, bila kenyataan tersebut dilihat dari sudut pandat aset kemajemukan yang kaya akan perspektif. Itu mengapa semboyan pilarnya adalah *bhineka tunggal ika,* yang secara faktual mampu mempererat tali persaudaraan antar sesama warga negara-bangsa (baca: manusia). (Tjarsono, 2013) Hanya saja di sisi lain, sebagai konsekuensinya, fakta keberagaman yang sebenarnya adikodrati itu cenderung disalah pahami hingga seringkali mengundang potensi konflik dan diskriminasi sosial, kadangkala atas nama perbedaan status, ras, etnis, agama, kekuasaan, afiliasi, bahkan golongan.

Hubungan antar umat beragama di Indonesia hakikatnya tak bisa dilepaskan dari problem keakuan. Wujudnya senantiasa berupa logika mayoritas *versus* minoritas. Identitas major tampaknya diliputi kekhawatiran *delisting,* yaitu suatu kesadaran devaluatif tentang lunturnya eksistensi komunal yang mulai kehilangan signifikansi peranan dan kontrolnya di ruang publik. Kecuali itu, eksponen minoritas lebih merasa dihantui oleh perampasan hak eksistensial yang dimilikinya sebagai warna negara yang setara. Karakter *opposites attract* (ketertarikan yang berlawanan) dalam konteks relasi biner ini dihadapi oleh hampir semua agama sebagai krisis identitas, baik secara *personal concern* maumpun *collective concern.* (Hanafi, 2018) Sekalipun esensi agama bagi sebagian kaum intelektual semacam Farid Esack, Ahmad Wahib, dan Karin Armstrong lebih berupa jalan keselamatan yang serupa, namun tidak untuk sementara kalangan yang justru membatasinya secara terbatas dan parsial. Bentuk disharmonis dalam konteks mayoritas-minoritas inilah yang bila tidak diberikan *antidote* segera, akan membawa dampak buruk terhadap gejala social-interaktif yang bersifat tragedic. (Umam, 2010)

Berdasar hal tersebut, meminjam teori yang dikemukakan Griffith, maka perlu dilakukan penanganan khusus yang berorientasi promotif, preventif, dan kuratif melalui revolusi moral-pengetahuan dalam bidang pendidikan, media massa, dan interaksi sosial. Langkah ini diharapkan dapat menggelorakan pemahaman-pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang lebih inklusif-pluralis, humanis-multikultural, dialogis-persuasif, kontekstual, dan substantif. Itulah mengapa penelitian ini akan coba menggali suatu konsep pendidikan multikulturalisme dari perspektif maqashid syari’ah sebagai bandul pendulum baru yang akan turut serta secara signifikan dalam rangka membangun kepribadian generasi bangsa yang berwawasan multikultural.

Image I



Deskripsi: Potensi Kebaruan Penelitian (novelty)

Peta konsep ini mengungkapkan setidaknya sebuah makna tersirat yang tersembunyi dibalik cluster warna yang melatarinya. Demikian klarifikasinya sebagai berikut; *pertama,* warna violet (terma pesantren, kurikulum, dan *multicultural education*); *kedua,* warna biru (terma *islamic education,* PAI, dan *role*); *ketiga,* warna hijau (*implementation* dan *research*); *keempat,* warna kuning (kurikulum merdeka, *perspective,* dan *philosophy*). Analisisnya, semakin warnanya terdegrasi menjadi terang, maka semakin tingkat kebaruannya relatif terafirmasi. Maka simpulannya, warna yang gelap itu ditafsirkan sebagai merepresentasikan himpunan penelitian dengan data jenuh. Sementara warna terang, menunjukkan adanya kemungkinan konfigurasi *fresh data* yang akan menunjang kepada temuan novelty. Karena itu, penelitian ini menemukan signifikansinya dalam penggagasan sebuah konsep pendidikan multikulturalisme dari sudut pandang maqashid syari’ah. Orientasinya sederhana, sekedar menjadi *creative tools* yang dapat membantu akselerasi penubuhan karakter anak bangsa menjadi lebih pancasilais. Pada akhirnya, Pancasila dapat ditemukan serpihan-serpihan konseptualnya pada disiplin ilmu Maqashid Syari’ah.

**METODE**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis bibliometrik. Pendekatan bibliometrik pada mulanya digunakan pada analisis kuantitatif terhadap literatur dan publikasi ilmiah untuk memahami tren, pola, dan karakteristik dalam bidang penelitian tertentu. Jadi secara umum, pendekatan ini lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif yang memang sejatinya melibatkan pengolahan data berbasis angka (Anam, 2022).

Namun demikian ada beberapa cara dalam konteks penelitian kali ini –, di mana analisis tersebut dapat digunakan juga dalam penelitian kualitatif, dengan beberapa pendekatan berikut: *Pertama,* identifikasi literatur yang mengharuskan adanya penyaringan literatur yang relevan untuk membangun landasan teori dan konteks sebuah penelitian. Sederhananya, pendekatan ini membantu mencari literatur secara lebih sistematis dengan menggunakan basis data indeksasi ilmiah dan analisis jaringan referensi yang paling signifikan dengan topik penelitian; *Kedua,* Analisis jaringan referensi yang dapat membantu peneliti memahami kesaling-terhubungan antar konsep satu sama lain melalui identifikasi konsep kunci, tokoh penting, atau aliran pemikiran yang memberikan pengaruh besar terhadap suatu bidang yang tengah diteliti; *Ketiga, mapping* literatur yang mencakup karya-karya yang relevan, tren penelitian, perubahan topik, hingga ke area penelitian yang kurang dijelajahi. Cakupan ini memberikan pemahaman tentang evolusi penelitian dan kesenjangan pengetahuan yang mungkin dapat menjadi fokus penelitian kali ini; *Keempat,* analisis sentimen dan kutipan yang dapat digunakan pada teks publikasi ilmiah. Tujuannya, membantu peneliti memahami pergeseran paradigma dalam penelitian kualitatif; *Kelima,* analisis perkembangan tema biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi puncak popularitas tema, perubahan fokus, dan pola penggunaan istilah kunci dalam sebuah literatur (Saribulan et al., 2023).

Maka instrumen analisis bibliometrik yang digunakan untuk memotret fenomena yang tertampak adalah aplikasi PoP dan Vos, dimana sekumpulan data awal yang didapat menunjukkan beberapa hal; (I) titik persinggungan dengan penelitian terkait cukun intens. Hanya saja intensifikasinya cenderung berbeda secara diametral pada objek penelitian yang dituju. Terma utama semacam pendidikan multikulturalisme dan kurikulum (merdeka) telah diracik sedemikian rupa sehingga sebaran abstraksi yang berkaitan dengan wilayah kajian implementatif menempati trend penelitian yang *established;* (II) point perbedaan yang cukup tampak berada pada subjek penelitian yang dijelajahi. Sebagaimana terlihat pada catatan data di bawah, bahwa subjek penelitian yang diajukan tersebar di antara lapangan penelitian nilai-nilai multikultural dan penerapannya di sekolah, madrasah maupun pesantren melalui kritiks teks atas pengkajian modul, kitab, pemikiran tokoh, *living philosophy*, dan tradisi. Sekalipun terdapat penelitian yang hampir serupa (Pendidikan Multikultural Perspektif Al Qur’an dan Hadits; Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama…), namun kerangka teori yang dibangunnya cukup berbeda, baik dari segi subjek maupun objek penelitian terkait.

Tabel Data I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cites | Authors | Title | GSRank |
| 0 | N Hidayati, A Yusuf, M Nasir | Relevansi Nilai-Nilai Multikultural Dalam Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan Dimensi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | 2 |
| 0 | MI Utari | Konsep Pendidikan Multikultural Penanggulangan Terorisme Dalam Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kurikulum Merdeka Pada Jenjang SMA | 4 |
| 0 | RS Marwah | Problematika Pendidikan Agama Islam dan Upaya Merespon Perkembangan Abad 21 | 10 |
| 0 | S Susanna, J Usman… | Guru di Persimpangan Kurikulum Baru: Dilema Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Keislaman | 11 |
| 0 | I Mustakim, A Yaim, O Fitriyanti… | Nilai-Nilai Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pendidikan Multikultural Indonesia dan Kanada | 12 |
| 0 | U Lutfiana, M Mispani… | Filsafat pendidikan Islam multikultural KH. Abdurrohman Wahid dan implementasinya dalam pendidikan Islam Indonesia | 22 |
| 0 | H Heriadi | PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERBASIS MULTIKULTURAL | 25 |
| 0 | WM Hamzah, M Idris, YA Otta | REORIENTASI DAN PRAKSIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PERSPEKTIF PEMIKIRAN AZYUMARDI AZRA | 29 |
| 0 | W Haryantati, Y Withasari | Pendidikan Berbasis Multikultural melalui Kunjungan Tempat Ibadah pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Pembinaan Pasir Putih Pangkal Pinang | 31 |
| 0 | N Munawaroh, YF Wakila | Peran Dosen Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Pembelajaran Dengan Nilai-Nilai Islam Berwawasan Multikultural | 32 |
| 0 | MF Rouf, M Nurhalim | Nilai Pendidikan Islam Tradisi Ngrowot dan Implementasinya dalam Materi Modul Ajar SKI Kurikulum Merdeka | 34 |
| 0 | FS Nisa, Y Yasin, RM Fitri | Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Kurikulum Merdeka pada Peserta Didik Kelas 4 SD Negeri Klampok 02 Kabupaten Brebes | 39 |
| 0 | SA Irbathy | MULTIKULTURALISME DALAM PRAKTIK PENDIDIKAN: KAJIAN LIVING PHILOSOPHY ATAS MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SD SPEAK FIRST KLATEN | 40 |
| 0 | Q A'yuni, S Sukari, MF Suparman… | Isu-Isu Kontemporer dan Tren dalam Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah dalam Perspektif Global | 46 |
| 0 | N Berahima, H Wantu | Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikultural di SMA Negeri 1 Bolangitang Barat | 53 |
| 0 | SN Halimah, S Shalahuddin | Penanaman Nilai Nilai Pendidikan Islam Multikultural Melalui Kajian Kitab Kuning dalam Membangun Keharmonisan Sosial Santri | 55 |
| 0 | MA Nurohman | Peran Filsafat Aksiologi dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar | 58 |
| 0 | MU Hasibullah | PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS | 61 |
| 0 | Z Zulfira | Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadist Di MAN 2 Pesisir Selatan | 63 |

Deskripisi: Data *Literatur Review* (GS. 2018-2023)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Relasi Multikulturalisme dan Maqashid Syari’ah**

Maqashid syari'ah secara bahasa bermakna maksud dan tujuan syari’ah. Artinya, keseluruhan syari’ah yang dititipkan Tuhan pada aturan agama mestilah didasarkan atas sebuah orientasi yang tak hanya berdimensi transenden, melainkan juga menggaransi aspek-aspek kemanusiaan esensial yang menjadi *concern*-nya. Salahsatunya terletak pada bagaimana merealisir kemaslahatan setinggi-tingginya bagi umat manusia secara umum. Kecuali itu, bila yang diusung adalah soal kepentingan bersama maka tentu dengan sendirinya akan menihilkan dan/atau mendangkalkan seminim mungkin aspek kemudharatan yang berpotensi merusak potensi esensial yang dimiliki manusia. Azaz prinsipil penopangnya berupa sejumlah *mabadi maqashid* (tujuan fundamental agama) yang komponennya terdiri dari beberapa falsafah; keadilan, persamaan, kemandirian, dan kemerdekaan. Karena itu, terdapat 5 (lima) indeks turunan dari *mabadi* tersebut yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta benda (*hifzh al-mal*), yang merupakan titik tumpu sekaligus tuju ajaran agama. Perilaku abai terhadap konteks tersebut berpotensi merusak harmoni hidup dan meluluh-lantakkan pondasi kerukunan agama dan dunia. (محمود, 2023)

Sementara itu, multikulturalisme yang bermula dari sebuah ontologi visioner tentang kuriositas purba pada hakikat keberagaman justru menegaskannya sebagai aset potensial interaktif untuk dapat saling memahami, meminjami, dan menghargai satu sama lain. *Alih-alih* merekapnya sebagai hambatan, hakikat keragaman diposisikan pada sebuah tajuk kebersamaan yang tak hanya *melulu* menelusuri aspek-aspek material dan tradisional suatu peradaban, namun juga meliputi system nilai, kredo, norma, pandangan hidup (*welstanchauung*), dan moralitas rasional sebagai landasan dasar bagi rumah perubahan dan interaksi sosial.

Berbahan sebelumnya, maka sesungguhnya terdapat irisan yang erat antara nilai-nilai maqashid syari'ah dengan multikulturalisme. (Salamah, 2022) Keduanya memiliki visi yang selaras dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Itulah mengapa relevansinya bertemu pada hal signifikan berikut: *pertama,* apresiatif terhadap nilai kemanusian dan perbedaan; *kedua,* afirmatif terhadap nilai-nilai persaudaraan dan kedamaian, baik berdasar atas pertimbangan keyakinan, kebangsaan, maupun kemanusiaan; *ketiga,* agresif terhadap perlindungan hak asasi yang secara adikodrati terus melekat sebagai manusia. Karenanya, kehampaan jiwa dari segala bentuk kesempurnaan mengharuskan ia lebih *aware* terhadap hakikat dirinya sebagai makhluk yang berorientasi pada cinta, kasih dan sayang.

Dalam konteks pendidikan, prinsip multikulturalisme dan nilai maqashid syari’ah seharusnya turut serta secara setara mempropagandakan keragaman budaya, suku, etnis, dan agama di tengah masyarakat. Konsep ini tentu sangat penting dan bertemali dengan kemajemukan Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat heterogenitas kebudayaan yang tinggi. Namun sekalipun begitu, kelainan ini tak perlu dipandang sebagai penyusup [*intruder*] yang merasuki keaslian budaya nusantara. Justru sebaliknya, orisinalitas inilah yang mampu menyemburatkan prinsip keseimbangan sosial yang terpaku pada teori praksis kebersamaan, gotong-royong, saling memahami, menghargai, ber-*tepo seliro* satu sama lain dan lain seterusnya. Karena itu, adagium yang dikembangkan untuk merawat pola berbangsa dan bernegara semacam ini bertahta pada sebuah karsa “Bhineka Tunggal Ika”. Filosofinya sederhana, bahwa kita sekalipun berbeda-beda sejatinya tetap berasal dari sumber yang sama, Tuhan YME. Maka fakta mengenai pluralitas dan diversitas ini menjadi sangat tak elok, bila esensinya kemudian diseret-seret untuk dimaknai interpretasinya secara sepihak dan dinarasikan pragmatismenya untuk kepentingan sesaat.

Karena itu, fakta keanekaragaman sosial bangsa ini sebetulnya bukan tanpa masalah. Plus minus. Tetapi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, harus selalu ada inovasi aktif untuk merawat model kebangsaan yang inklusif. Jika tidak, potensi ancaman yang ditimbulkannya cukup mengerikan. Itulah mengapa analisis korelatif antara multikulturalisme dan nilai maqashid syari’ah juga turut dibentangkan, khususnya dalam konteks pendidikan yang lebih sistemik dan strategis. Dari sini, penulusuran acak atas kontribusi penting nilai-nilai maqashid syari’ah secara teoretis dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai peserta didik menjadi sangat penting untuk dipetakan. (الربابعه, 2021) Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, maqashid syari'ah menekankan nilai persamaan dan keadilan tanpa memandang perbedaan suku, ras, warna kulit, dan agama. Hal ini sejalan dengan semangat multikulturalisme yang menghargai kebhinekaan dan kesetaraan; *Kedua*, salah satu tujuan maqashid syari'ah adalah terwujudnya *ukhuwah wathoniyah* yang melambangkan persatuan dan kesatuan umat beragama. Hal ini dibutuhkan untuk menumbuhkan solidaritas sosial dalam masyarakat yang relative majemuk; *Ketiga*, maqashid syari'ah bertujuan melindungi akal pikiran manusia agar digunakan sebaik mungkin. Ini berkaitan dengan pembentukan pola pikir kritis dan terbuka terhadap keragaman budaya dalam pendidikan multikultural, dan; *Keempat*, salah satu orientasi maqashid syari'ah pembumian nilai-nilai kemanusiaan universal. Maka upaya ini sejalan dengan semangat humanisme yang menjadi pondasi utama pendidikan berbasis multikulturalisme.

Selain itu, nilai maqashid syari'ah juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kurikulum merdeka hari ini. Jika ditelisik ke dalam, ditemukan bahwa salahsatu kekuatan kurikulum merdeka itu adalah *set up* yang harus memberi keleluasaan lebih kepada siswa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Indikator ketersinggunnya dengan maqashid syari'ah terletak pada prinsip *hifzh al-aql,* dimana bertujuan melindungi sektor kebebasan berkehendak yang bermulai dari pikiran seseorang. Lebih lanjut, kemandirin sikap dan berpikir ini pada putaran akhirnya akan mendorong terbentuknya pola pikir kritis, kreatif dan melahirkan keterampilan yang kompetitif, khususnya pada pergerakan industry 5.0. Maka seandainya point paling penting yang ingin dibangun oleh indeks maqashid syari'ah itu soal kemasalahatan publik, baik dalam hal berbangsa dan bernegara, maka tentu pengembangan intelektual-kognitif yang senafas dengan kompetensi inter-personal yang dimiliki siswa secara *par excellence* akan menuangkan dampak kemanfaatan yang lebih terstruktur, strategis, dan implementatif bagi kemajuan peradaban bangsa ini.

Kecuali itu, dari aspek pendekatan pembelajaran pun, pertautan konsep maqashid syari’ah dengan semangat multikulturalisme tampaknya cukup berkait kelindan. Intensitasnya bisa terlihat dari sejauh mana penetrasi kurikulum merdeka dalam memanfaatkan isntrumen pendekatan yang bersifat kolaboratif-interaktif dan bernuansa guyub-kekeluargaan dalam setiap pembelajarannya. Dengan demikian, pendekatan tersebut beresonansi sedemikian rupa dengan prinsip *ukhuwah* berbasis persaudaran kemanusiaan (*humanity brotherhood*) yang mengedepankan akselerasi terbuka atas berbagai akses kebudayaan yang heterogen. Di titik itu, modal awalnya adalah inovasi pembelajaran yang laten. Tujuan akhirnya sudah barang tentu berupa ketercapaiain integrasi bangsa melalui persatuan dan kesatuan seluruh eksponen kebangsaan. (Firdaus, 2022) Namun hal ini masih perlu penopangan lain, yaitu melalui aspek kebebasan penentuan kurikulum yang inkslusif. Sampai batasan itu, wujud dari keadilan dan kesetaraan sosial yang dianggunkan oleh prinsip maqashid syari’ah menemukan relevansinya pada konteks kemandirian kurikulum yang membuka ruang lebar untuk menumbuhkan nilai-nilai inklusi sosial dengan termanifestasikannya pendidikan multikulturalisme. Lebih daripada itu, fleksibilitas kurikulum merdeka memiliki relevansi kuat dengan berbagai prinsip dan tujuan dalam maqashid syari'ah. Keduanya dapat saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan sistem pendidikan yang progresif, berkeadilan sosial dan paling utama, membentuk karakter dan budi pekerti siswa melalui penguatan pendidikan keagamaan dan pembinaan akhlak mulia peserta didik.

 Semua paparan terkait relevansi nilai maqashid syari’ah itu semakin menemukan *novelty*-nya dengan pendidikan multikulturalisme melalui penelisikan terhadap tabel data di bawah yang menegaskan kemungkinan adanya titik temu di antara keduanya yang tak jenuh. Maka dari sekian banyak sebaran kata pada isian tabel tersebut, hanya terdapat terma-terma yang saling terhubung satu sama lain, kecuali terma maqashid syari’ah. Dengan demikian, penelitian semisal sebelumnya boleh jadi ada, namun berbeda pada konteks intensifikasi objek kajian yang dilakukan.

Tabel Data II.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Term** | **Occurrences** | **relevance score** |
| 1 | Implementation | 9 | 0.3346 |
| 2 | islamic education | 7 | 15.195 |
| 3 | Kurikulum | 104 | 0.6581 |
| 4 | kurikulum merdeka | 43 | 0.4052 |
| 5 | multicultural education | 6 | 24.158 |
| 6 | Pai | 12 | 0.1603 |
| 7 | pendidikan agama islam | 23 | 0.3759 |
| 8 | Perspective | 7 | 12.717 |
| 9 | Pesantren | 15 | 15.195 |
| 10 | Philosophy | 6 | 12.715 |
| 11 | Research | 14 | 12.896 |
| 12 | Role | 8 | 0.7783 |

Deskripisi: Kata yang Sering Muncul (GS. 2018-2023)

1. **EPKonsep Pendidikan Multikulturalisme Perspektif Maqashid Syari’ah**

Secara prinsip, harus diakui bahwa bahwa kesadaran multikultural itu penting sejauh diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan Syariah, khususnya dalam konteks masyarakat majemuk. Oleh karena itu, diperlukan terobosan pemikiran dan pendekatan yang inklusif untuk mentransformasikan praktik-praktik syariah agar sejalan dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*. Prinsip ini tentu saja masih perlu terus-menerus digaungkan demi meminimalisir potensi gesekan sosial dan konflik antar kelompok yang rentan tersulut *gegara* perbedaan. Maka ijtihad dan reinterpretasi syariah yang progresif adalah solusi paling rasional untuk menjembatani idealitas ajaran Islam dengan faktisitas nilai-nilai multikulturalisme, humanisme, dan kesetaraan modern. (Aziz & Ahmad, 2016) Tanpa ijtihad yang mapan dan mumpuni, praktik-praktiks syariah justru dikhawatirkan menjadi sangat kontraproduktif dengan semangat perdamaian dan kemaslahatan umat. Itulah mengapa dalam sesi ini akan coba dibentangkan konsep pendidikan multikulturalisme sebagaimana dikehendaki Islam melalui bacaan analitiknya terhadap nilai-nilai universal yang terdapat dalam disiplin Ilmu Maqashid Syari’ah. Konsep yang ditawarkannya seminimal mungkin akan dipetakan ke dalam bentuk pointer-pointer inti yang menjadi penopang pendidikan berbasis multikulturalisme. (Herdiansyah & Hidayati, 2021)

 Konsep pertama, direpresentasikan melalui prinsip kesadaran multikulturime. Hanya saja, kesadaran yang diajukan maqashid syari’ah ini lebih berkarakter religius ketimbang rasional *an sich*. Sebabnya, manifestasi ontologisnya kembali pada tiga referensi penting yang mengitarinya; trasendensi (keimanan), humanisasi (*amar makruf*), dan liberasi (*nahi munkar*). Di titik ini maka kesadaran tersebut merupakan bentuk sikap inklusif terhadap ragam ekspresi keragaman keyakinan yang *existing*. Pilarnya didasarkan atas prasangka positif atas unsur kebajikan langit yang disuarakan oleh setiap agama, yang sejatinya mengajarkan nilai-nilai universal kemanusiaan semacam perdamaian, cinta kasih, keadilan, dan kesetaraan. (Wera, 2021) Oleh karena itu, walaupun terdapat perbedaan dalam segala lini; baik doktrin, praktik ibadah formal, maupun lainnya tak lantas menghalangi komunitas *inter-religious* untuk dapat hidup berdampingan secara damai dalam satu ikatan kebangsaan, menjalin interaksi sosial yang konstruktif, saling menghormati atas dasar kemanusiaan semata, serta bekerja sama mewujudkan kemaslahatan bersama atas nama masyarakat plural. Berdasarkan hal itu, agenda pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kesadaran multikultural-religius ini pun mutlak perlu diberikan semenjak dini agar tumbuh generasi baru dengan kesadaran kosmopolit yang mampu menerima perbedaan keyakinan sebagai realitas alamiah yang adi kodrati.

 Meski demikian, pembangunan kesadaran multikulturalisme religius itu bukanlah tanpa tantangan. Salahsatu kendala utamanya adalah potensi munculnya konflik akibat perbedaan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut kelompok agama. (Hidayat et al., 2023) Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing tradisi kepercayaan memiliki pandangan teologis, doktrin, dan tata aturan spesifik yang membentuk pola pikir para pemeluknya. Karena itu menjadi wajar bila terkadang tumbuh ketegangan yang saling kontradiktif tersebut, terlebih didukng dengan rasa fanatisme *in-group* yang lebih dominan dibandingkan semangat menghargai keberagaman. Pada konteks demikian, potensi konflik itu seharusnya dapat dimininalisir oleh para pemuka agama, pendidik, pembuat kebijakan, dan elemen masyarakat sipil lainnya secara kolektif dan berkelanjutan dengan suatu metode habituasi dan konstruksi, baik melalui pendekatan kultural mapun struktural, untuk mencipta suatu kondisi yang harmonis. Pirantinya adalah dialog transformatif antar budaya dan keyakinan, di mana secara intrinsik mengarah pada penemuan nilai-nilai universal yang aplikatif bagi perdamaian, penciptaan ruang-ruang publik bagi komunitas lintas iman untuk saling berinteraksi dan menumbuhkembangkan empati satu sama lain, sehingga keberagaman nilai dan keyakian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang dipertentangkan, melainkan justru dinikmati sebagai ragam kekayaan spiritual dan budaya masyarakat majemuk yang *ekstase*.

Kecuali itu, salahsatu terobosan strategis untuk mengatasi problema konflik nilai dan keyakinan sebagaimana paparan sebelumnya adalah rekonstruksi kurikulum pendidikan inklusif, yakni melalui rekayasa formulasi materi ajaran dan pedagogi pengajaran yang tak hanya mentransmisikan doktrin teologis secara tekstual-normatif, melainkan juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai humanis, toleransi dan cinta kasih universal di dalamnya. Asupan tentang resolusi konflik dan rekonsisiliasi antarbudaya juga bagian tak terpisahkan dari kurikulum insklusif tersebut. Dengan demikian, ekspektasinya adalah para peserta didik kelak dapat memahami keyakinan intra-personalnya secara benar sekaligus menghargai keberagaman keyakinan orang lain (*the others*) secara baik, sehingga terbentuk generasi masa depan yang memiliki kosmopolitanisme spiritual yang inklusif, toleran, cinta damai dan anti diskriminasi, sembari tetap menjaga keseimbangan pertimbangan kekhasan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam masing-masing tradisi kepercayaan yang diyakini. Berbekal paparan demikian, maka kurikulum pendidikan inklusif ini tidak akan menghilangkan esensi ajaran substansial suatu agama, yang di satu sisi akan terus mengembangkan kekhasan identitas internalnya, namun di sisi lainnya tetap mampu mendorong tumbuh suburnya unsur eksternalitas yang santun, berupa empati penghargaan dan penghormatan yang sebijak-bijaknya terhadap segala komunitas keagamaan yang beragam.

Konsep kedua untuk membangun pendidikan multikulturalisme perspektif maqashid syari’ah selayaknya didasarkan atas suatu konsep toleransi yang moderat. Membangun toleransi moderat antarumat beragama merupakan agenda penting dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan bersama (*jalb al-manafi’*), yang merupakan salah satu kaidah utama dalam ilmu Maqashid Syariah. Toleransi yang moderat sejatinya tidak berarti bersikap relatif terhadap segala macam paham, melainkan sikap bijaksana yang tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran yang diakui oleh keseluruhan agama, dengan mengakui hak setiap orang untuk menganut keyakinannya tanpa diskriminasi dan unsur pemaksaan superioritas pandangan *in group* terhadap kelompok eksternal lain (*out group*). Oleh sebab itulah, konsep toleransi moderat dalam Islam terbangun atas dasar prinsip keadilan (*‘adl*), kesetaraan (*musawah*) dan kebajikan bersama (*ta’awun*), yang mengandaikan suatu harmoni keberagaman yang tidak memperlakukan perbedaan sebagai permusuhan. Untuk itulah, maka pendidikan multikulturalisme religius yang inklusif mutlak diperlukan, tidak hanya untuk mentransmisikan dogma teologis namun juga menanamkan kesadaran majemuk akan nilai-nilai universal kemanusiaan yang menjadi inti sari ajaran dari semua agama. Dengan begitu, cita-cita tentang masyarakat majemuk yang *madani* (baca: beradab) dapat terwujud sebab kompetensinya ditopang oleh segenap kemampuan pengelolaan hati untuk beresonansi dengan ragam perbedaan keyakinan demi mewujudkan kemaslahatan luhur yang berlandaskan atas kearifan spiritual. (نصيف, 2019)

Secara teoritis, konsep toleransi moderat (Hasan, 2023) yang dibangun atas prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan bersama dalam maqashid syariah ini berimplikasi pada pengakuan akan legitimasi keberagaman keyakinan dalam masyarakat majemuk. Toleransi bukan berarti relativisme mutlak yang mendewakan perbedaan, melainkan sikap bijak dan proporsional dalam merangkul kemajemukan. Adapun secara implementatif, penguatan toleransi moderat dan inklusivisme melalui pendidikan multikultural-religius akan berimplikasi positif pada terciptanya kerukunan dan harmoni sosial antarpemeluk agama yang berbeda. Dengan membekali generasi muda dengan wawasan kosmopolitanisme spiritual sejak dini, maka konflik atas nama agama dapat dicegah dan masyarakat majemuk yang madani pun terwujud. Maka dari itu, sangat penting bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan pemuka agama untuk bersama-sama mengimplementasikan gagasan ini baik melalui rekonstruksi kurikulum pendidikan agama yang inklusif, maupun program-program konkret penguatan moderasi beragama di tingkat akar rumput. Kemajemukan yang madani hanya bisa tercapai melalui upaya bersama yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

**KESIMPULAN**

Sesuai dengan semangat pembangunan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka, menjadi suatu keniscayaan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan religiusitas inklusif sejak dini melalui kurikulum pendidikan yang relevan. Sebagaimana analisis ilmiah di atas menunjukkan, bahwa transformasi kurikulum pendidikan agama menuju sifat yang lebih inklusif dan koheren dengan semangat multikulturalisme merupakan medan strategis untuk mengurangi potensi konflik nilai dan identitas di tengah masyarakat majemuk. Dengan membekali generasi bangsa sejak usia dini maka diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi pelajar Pancasila sejati yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta disiplin hukum dan religius-spiritualis. Lebih dari itu, tetap menghargai keberagaman budaya, suku dan agama sebagai kekayaan bangsa. Pendidikan agama berbasi maqashid syari’ah itulah, karenanya, merupakan unsur penting dalam membangun fondasi kurikulum merdeka yang memekarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini tentu dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan konkret; (1) Konten materi pelajaran agama perlu direkonstruksi agar tidak hanya berfokus pada aspek teologi normatif, namun juga memuat nilai-nilai humanis universal seperti cinta kasih, keadilan, dan hak asasi manusia yang konvergen lintas agama. Prinsip ketuhanan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila dapat menjadi landasan dalam merumuskan konten ini; (2) Pendekatan pedagogi materi-materi keagamaan perlu mengedepankan aspek *critical thinking* yang mendorong adanya penghargaan atas perbedaan pandangan; (3) Kurikulum pendidikan agama perlu memasukkan pendidikan *religious studies* dan pembelajaran resolusi konflik antar-keyakinan. Dengan begitu, peserta didik diajak membangun empati, simpati, respek dan apresiasi lintas iman; (4) Peran guru yang harus memiliki wawasan luas tentang agama-agama dan mampu menjadi teladan toleransi serta penghargaan atas keberagaman. Maka atas dasar pendekatan inilah pada akhirnya akan dapat membentuk profil pelajar Pancasila yang religius dan humanis sekaligus.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anam, M. S. (2022). Analisis bibliometrik perkembangan penelitian halal food. *Journal of Halal Industry Studies*.

Aziz, S. A., & Ahmad, R. (2016). THE ROLE OF MAQASID AL-SHARIAH IN THE CONTEMPORARY PHILOSOPHY OF JURISPRUDENCE EPISTEMOLOGY: PERANAN MAQASID SHARIAH DALAM …. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic …*. http://al-qanatir.com/aq/article/view/38

Firdaus, S. (2022). Al-Qur’an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(2), 120–138. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594 0CITATIONS0 total citations on Dimensions.

Hadi, S. (2020). Lasem: Harmoni dan Kontestasi Masyarakat Bineka. *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, *1*(1), 163–208. https://doi.org/https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v1i1.49

Hanafi, I. (2018). Agama dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, *10*(1), 48–67. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v10i1.5720

Hasan, B. M. (2023). الإسلام والدستور والتحول الاجتماعي نحو التعايش الحضاري دراسة تحليلية في التشريع الدستوري الإسلامي والعقد الاجتماعي الاندونيسي (Pancasila). *Al Ghazali*. https://doi.org/https://doi.org/10.52484/al\_ghazali.v6i1.496

Herdiansyah, H., & Hidayati, S. W. (2021). PERAN MAQASHID SYARI’AH DALAM IJTIHAD. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:245628582

Hidayat, R., Setiawan, A., & Juliana, K. A. (2023). Problematika dan Solusi Pendidikan Berbasis Multikultural di Era Globalisasi dan Modernisasi. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2023.14(1).15-23

Salamah, F. (2022). PENGEMBANGAN TEORI MAQASHID SYARI’AH DALAM KONTEKS MODERNITAS: STUDI PEMIKIRAN HUMANISME GUS DUR. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.2859

Saribulan, N., Rassanjani, S., & Dahlawi, D. (2023). Analisis Isi dan Bibliometrik Isu Ketenagakerjaan di Indonesia. *Journal of Governance and …*.

Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Transnasional*, *4*(2), 876–888. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5150

Umam, F. (2010). Menimbang Gagasan Farid Esack Tentang Solidaritas Lintas Agama. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(1), 116–128. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.116-128

Wera, M. (2021). Menciptakan Suasana Perjumpaan Antar-Agama: Refleksi Filosofis Etika Global Hans Küng. *Jurnal Teologi Amreta (ISSN: 2599-3100)*. https://doi.org/https://doi.org/10.54345/jta.v3i1.28

الربابعه, ف. م. س. (2021). أهداف التربیة الإسلامیة فی ضوء البعد الاجتماعی لمقاصد الشریعة. *مجلة کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بدمنهور*. https://doi.org/10.21608/JCIA.2021.181238

محمود, م. ا. (2023). نظرية المقاصد وعلاقتها بعلم أصول الفقه. *مجلة کلية دار العلوم – جامعة الفيوم*. https://doi.org/10.21608/MKDAF.2023.226015.1106

نصيف, ص. ح. (2019). التسامح وتجلياته في الفكر العربي الحديث محمد عبده إنموذجاً. *لارك*. https://doi.org/https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss13.810